



# Buletin Parlementaria

Nomor 1032/I/XI/2018 • November 2018

## Paripurna Setujui RUU Prioritas 2019 dan APBN 2019



9 772614 339005

Fahri Hamzah Desak Kemenhub Segera Evaluasi Lion Air

# Paripurna Setujui RUU Prioritas 2019 dan APBN 2019



Foto: Jayadi | Rni

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima dokumen APBN 2019 dari Wakil Ketua Banggar DPR RI Ahmad Rizki Sadig saat Rapat Paripurna

**Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018/2019 menyetujui hasil penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2019 dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang memimpin jalannya Rapat Paripurna pun menanyakan persetujuan seluruh Anggota Dewan yang hadir.**

“Kami selaku Pimpinan Rapat Paripurna akan menanyakan kepada Anggota Dewan, apakah penetapan hasil penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dapat disetujui untuk mejadi Prolegnas RUU Prioritas tahun 2019?” tanya Agus pada Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10). Pertanyaan itu pun dijawab “Setuju” oleh para Anggota Dewan.

Ketukan palu menjadi tanda pengesahan. Turut mendampingi Agus memimpin Rapat Paripurna, yakni Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Sebelumnya Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas melaporkan, dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2019, pihaknya telah menerima usulan 77 RUU dari Komisi,

Fraksi, Anggota DPR RI, dan masyarakat. Sedangkan dari pemerintah sebanyak 17 RUU, dan dari DPD RI sebanyak 9 RUU. Akhirnya Panitia Kerja Baleg memutuskan 4 RUU usulan baru ke dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019.

Panja Baleg bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI telah membahas RUU Prioritas

2019. Adapun empat RUU yang dimaksud adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan usul DPR RI.

Kemudian, RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan usul DPR RI. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan usul DPR RI. Dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia usul pemerintah.

Panja Baleg juga menetapkan penggantian satu RUU dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, yaitu RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber, untuk menggantikan RUU tentang Persandian. Selain itu Panja juga menetapkan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2019 sebanyak 12 RUU usulan baru dan 43 RUU berasal dari Prolegnas RUU prioritas 2018.

Dalam laporannya, Supratman menyampaikan, Baleg DPR RI bersama dengan Kemenkum HAM RI, beserta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, sepakat untuk menggunakan parameter terhadap daftar RUU yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 yaitu, pertama RUU yang dalam tahap Pembicaraan Tingkat satu. Kedua RUU yang menunggu Surat Presiden (Surpres).

Ketiga RUU yang dalam tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsep di Baleg DPR RI. Keempat RUU yang dalam tahap penyusunan dan tersedia Naskah Akademik dan RUU-nya. Dan yang kelima RUU usulan baru yang memenuhi urgensi tertentu dan telah tercantum dalam Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019.

“Berdasarkan hal tersebut di atas, Panja telah membicarakan dan membahas semua usulan RUU tersebut dalam Rapat Panja yang diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2018. Pendapat dan pandangan yang mengemuka dalam pembicaraan dan pembahasan Rapat Panja,” imbuh legislator Partai Gerindra itu.

Dalam kesempatan yang sama, DPR RI juga mengesahkan RUU APBN 2019 menjadi Undang-Undang (UU). Dalam laporannya pada Rapat Paripurna, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ahmad Rizki Sadig menyampaikan, Banggar DPR RI menetapkan asumsi makro dalam APBN 2019, diantaranya penetapan nilai tukar rupiah sebesar Rp 15.000 terhadap dolar Amerika Serikat (AS), dari sebelumnya

dalam RAPBN sebesar Rp 14.400.

Secara lengkap asumsi makro menetapkan, pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 3,5 persen, *lifting* minyak bumi 775 ribu barel per hari dari sebelumnya 750 ribu barel per hari, dan *lifting* gas bumi 1.250 barel setara minyak per hari. Sementara tingkat bunga SPN-3 bulan 5,3 persen dan harga minyak mentah Indonesia 70 dolar AS per barel.

“Dengan asumsi makro tersebut maka pendapatan negara dalam APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.165,111 triliun yang terdiri pendapatan dalam negeri sebesar Rp 2.164,676 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 435,3 miliar,” papar Rizki.

Dilanjutkan legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu, penerimaan dalam negeri itu terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.786,378 triliun dan PNBPN sebesar Rp 378,297 triliun. Pada bagian lain, Rizki juga menambahkan, pengeluaran APBN 2019 berupa belanja negara sebesar Rp 2.461,112 triliun.

Sementara belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L Rp 855,445,8 triliun dan belanja non K/L Rp 778,893,7 triliun. Yang tidak kalah pentingnya juga anggaran pendidikan 2019 yang ditetapkan Rp 492,455 triliun atau sama dengan amanat konstitusi sebesar 20 persen. Sedangkan anggaran kesehatan sebesar Rp123,113 triliun atau 5 persen dari total belanja negara di atas.

Dengan besaran pendapatan dan belanja negara itu, defisit pada APBN 2019 disepakati sebesar 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar Rp 296 triliun.

Rizki menuturkan, defisit itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, dan mendukung kegiatan produktif, guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Besaran defisit tersebut adalah akumulasi dari selisih jumlah penerimaan dan pembiayaan di tahun mendatang.

Pengesahan UU APBN 2019 ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mewakili pemerintah.

Dalam pidatonya, Sri Mulyani memastikan, APBN tahun depan akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian global, namun tetap suportif terhadap program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. ■ eko,mh,hs/sf



#### PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

#### KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

#### WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)

#### PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

#### PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

#### WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

#### REDAKTUR

Sofyan Efendi

#### SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

#### ANGGOTA REDAKSI

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,

Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom

Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske

Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,

Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli

#### REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

#### FOTOGRAFER

Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,

Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,

Azka Restu Fadilah, Geraldi Opie

#### ADMINISTRASI

Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher

#### ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: bag\_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

#### PENERBITAN

##### PIMPINAN PENERBITAN

Eko Priyanto, S.E. (Plt. Kabag Penerbitan)

##### PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

##### PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

##### DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

##### STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

##### PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

##### KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

##### ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

##### STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email: bag\_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Wakil Presiden merangkap Menteri Luar Negeri Republik Panama, H.H. Ms. Isabel Saint De Malo De Alvarado

Foto: Jaka | od

## DPR Ajak Panama Berantas Tindak Pencucian Uang

**Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak Panama senantiasa bergandengan tangan dengan Indonesia dalam memberantas tindak pencucian uang. Mengingat Indonesia dan Panama telah menjadi bagian dari sekitar 146 negara yang berkomitmen melaksanakan *Automatic Exchange of Information (AEOI)*. AEOI merupakan sebuah rencana dari negara G20 yang diinisiasi *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* mengenai pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara.**

“Komitmen Indonesia menerapkan AEOI berdasarkan *common reporting standard* yang diwujudkan melalui penandatanganan multilateral competent authority agreement pada 3 Juni 2015 di Paris, Perancis. Kami senang pada 15 Januari 2018, Panama juga telah melakukan hal serupa. Karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah memasukan Panama sebagai salah satu dari 79 negara partisipan yang dapat saling otomatis bertukar informasi keuangan pada akhir 2018 ini,” ujar Ketua DPR RI saat menerima Wakil Presiden merangkap Menteri Luar Negeri Republik Panama, H.H. Ms. Isabel

Saint De Malo De Alvarado di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/10).

Turut hadir dalam delegasi rombongan Wakil Presiden Panama antara lain: Gina Marie Latoni (Advisor of the Vice President), Deborah Ho (Ambassador of Panama to Indonesia), Dennise Cabrera Jaramilo (Head of Direction of Asia - Pacific Affairs), Jose Ulises Lescure (Sub Director General of Protocol and States Ceremonial), Yessenia Chala (Head of Departement of Latin American Integration, and In-charge of Multilateral Economic Affairs), Maite Saira (Directorate for Publication and Information), Lily Yuniarly (Assistant of Ambassador of Panama to Indonesia).

Turut mendampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo antara lain Budhy Santoso (Dubes Indonesia untuk Panama), Hasrul Azwar (Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI) dan Indra Iskandar (Sekretaris Jenderal DPR RI).

Bamsuet, sapaan akrab Ketua DPR RI ini menambahkan, melalui keikutsertaan dalam AEOI, Indonesia bisa secara otomatis mengetahui siapa saja wajib pajak yang membuka rekening di Panama maupun di negara lain yang sudah tergabung dalam AEOI. Seperti Australia, Belanda, Bermuda, British Virgin Island, Cayman Islands, Hong Kong, Inggris, Jepang, Luxembourg, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura.

Sebagai payung hukumnya, DPR RI dan pemerintah sudah mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. “Melalui keikutsertaan dalam AEOI, Panama dan Indonesia punya semangat yang sama mewujudkan dunia yang lebih berkeadilan. Tanpa memberikan ruang bagi pencucian uang, kedua negara telah menunjukkan komitmennya untuk menjunjung tinggi hukum dalam proses pembangunan di masing-masing negara,” jelas Bamsuet.

Legislator Partai Golkar itu menilai, keikutsertaan dalam AEOI akan semakin menguatkan posisi Panama sebagai salah satu negara kunci bagi Indonesia. Karena sekitar 60 persen produk ekspor Indonesia yang dikirim ke berbagai kawasan Amerika seperti Amerika Selatan, Amerika Latin, Amerika Utara dan Karibia masuk melalui Panama.

“Pada tahun 2017, nilai total perdagangan Indonesia dan Panama mencapai 129,94 juta dolar AS. Sementara pada Januari sampai dengan Agustus 2018, total perdagangan kedua negara telah mencapai angka 99,381 juta dolar AS. Nilai perdagangan ini akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang, seiring meningkatnya hubungan baik kedua negara,” imbuh Bamsuet.

Selain peningkatan di sektor perdagangan, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menginginkan adanya peningkatan kerjasama di sektor industri kemaritiman yang menjadi salah satu industri andalan Panama. Tak heran jika saat ini terdapat sekitar 6.390 anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal-kapal berbendera Panama.

“Indonesia terletak diantara Samudera Pasifik dan Hindia, sedangkan Panama terletak diantara Samudera Pasifik dan Atlantik. Kesamaan posisi ini membuat Indonesia dan Panama bisa meningkatkan kerjasama maritim seperti dalam pengelolaan pelabuhan transit dan infrastruktur pelabuhan, keselamatan dan keamanan navigasi, sertifikasi pelaut serta registrasi kapal. Sejalan dengan konsep Nawacita Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” terang Bamsuet.

Legislator dapil Jawa Tengah VII ini juga meminta pemerintah Panama bisa menghapus status ‘restricted’ pada penerbitan visa Panama bagi warga Indonesia pemegang paspor biasa. Karena dengan adanya status tersebut, warga Indonesia kesulitan mendapatkan visa Panama lantaran prosesnya yang memakan cukup waktu.

“Kedua negara sudah melakukan bebas visa bagi pemegang paspor dinas dan diplomatik. Alangkah baiknya jika status ‘restricted’ terhadap pemegang paspor biasa Indonesia bisa dihapuskan. Sehingga mempermudah warga Indonesia yang ingin berkunjung ke Panama, baik untuk liburan, bekerja, maupun menempuh pendidikan. Dengan demikian, kedua negara bisa saling mempererat hubungan persaudaraan melalui *people to people contact*,” pungkas Bamsuet. ■ **ann/sf**

# Utut Adianto: Tidak Benar Perancis Setop Impor Kelapa Sawit Indonesia

**Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto mengatakan informasi yang beredar terkait penyetopan atau penolakan impor minyak kelapa sawit (palm oil) asal Indonesia oleh Perancis itu tidak benar. Bahkan mereka ingin mempelajari bagaimana perkembangan industri sawit yang ada di Indonesia.**

**H**al tersebut diungkapkan Utut setelah menerima delegasi Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) Parlemen Perancis-Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Group Persahabatan Perancis-Indonesia Raphel Gerard di Ruang Tamu Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10).

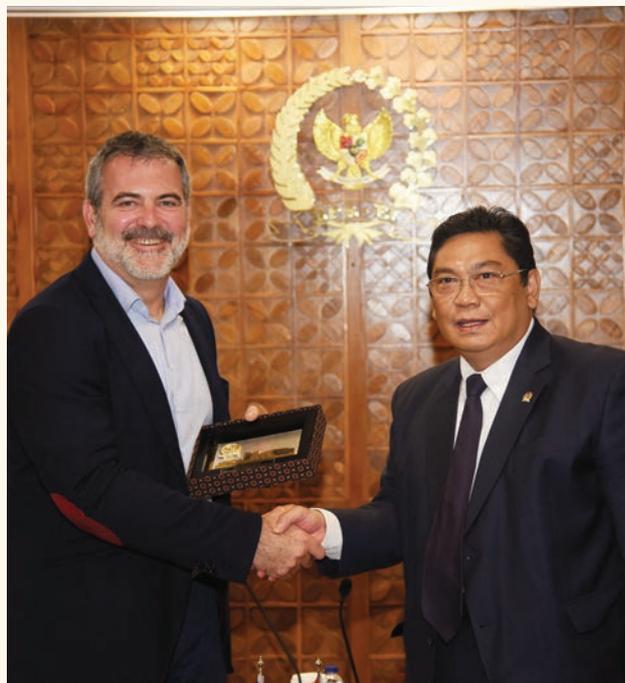
“Mereka juga memberi informasi yang baik perihal kelapa sawit kita. Salah satu poin yang ingin mereka pelajari dari kunjungan ini adalah mengenai minyak sawit. Seperti yang disampaikan, minyak sawit merupakan salah satu isu yang paling sering dibahas di Majelis Perancis,” tambah Utut.

Menurut Wakil Ketua yang membidangi BAKN, BURT dan Hubungan Antar Lembaga ini, delegasi Perancis ingin bertemu langsung dengan pengusaha sawit yang ada di Indonesia serta ingin mempelajari cara Indonesia mengembangkan sawit. Seperti diketahui, ribuan hektar kebun sawit tersebar di Sumatera dan Kalimantan.

“Nantinya, Delegasi Perancis akan menyampaikan informasi yang akurat tentang produksi sawit di Indonesia. Karena seringkali informasi yang sampai ke Majelis Perancis tidak sesuai dengan fakta. Untuk itu, mereka kami ingin mengetahui yang sebenarnya,” tandas legislator PDI Perjuangan itu.

Ketua Group Persahabatan Perancis-Indonesia Raphel Gerard juga mengakui tidak benar bahwa negaranya menolak minyak sawit asal Indonesia. Justru kedatangannya ke Indonesia untuk serius memperdalam industri kelapa sawit yang saat ini digadang sebagai salah satu sumber energi terbarukan.

Selain itu, Delegasi Perancis menurut Raphel akan melanjutkan kunjungan ke Palu, Sulawesi Tengah, guna memastikan bantuan peralatan dari Perancis bermanfaat bagi masyarakat Palu. Serta akan mengganti dan menghibahkan beberapa peralatan baru sebagai bentuk kepedulian Perancis terhadap bencana yang menimpa Palu dan sekitarnya. ■ **es/sf**



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menerima Ketua Group Persahabatan Perancis-Indonesia Raphel Gerard

Foto:Gerard | tod

# Fahri Hamzah Desak Kemenhub Segera Evaluasi Lion Air

**Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub), segera melakukan evaluasi kepada maskapai perbangan Lion Air, menyusul musibah jatuhnya pesawat dengan nomor penerbangan JT-610 di perairan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, baru-baru ini.**

“Kami minta Perhubungan segera melakukan evaluasi kepada Lion Air. Kita wajib tahu apa penyebabnya,” kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/10).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu menegaskan bahwa evaluasi oleh Kemenhub terhadap maskapai penerbangan berlogo Kepala Singa itu perlu dilakukan, karena keselamatan penerbangan tidak bisa ditawar-tawar.

“Sebenarnya ada apa sih? Kenapa lagi-lagi Lion Air yang makan korban, kenapa tidak bisa mencontoh *safety*-nya pesawat

Garuda,” heran Fahri.

Selain itu, dirinya juga meminta dalam rangka pembayaran asuransi korban agar cepat diselesaikan. “Percepatan pembayaran asuransi bagi korban harus diutamakan,” harap Anggota DPR RI dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu lagi.

Di sisi lain, Fahri mengapresiasi upaya cepatnya pihak Basarnas menemukan titik koordinat jatuhnya pesawat. Kalau penyebab kecelakaan itu, menurutnya Kementerian Perhubungan yang harus mengungkapnya, dia hanya melihat dari sisi Undang-Undang.

“Ini penting, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Lion Air



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Foto: Rumi | lod.

harus menjelaskan ada apa dan kenapa, agar kedepannya Lion air tidak lagi seperti ini, apakah ada pelanggaran UU atau tidak. Ini penting untuk memastikan keselamatan penerbangan, itu nomor satu,” pungkas Fahri. ■ **tn/mp**

## Komisi V Ingin Pastikan Pembangunan Bandara NYIA Berjalan Baik

**Komisi V DPR RI ingin memastikan progres pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Provinsi DI Yogyakarta berjalan dengan baik. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menjelaskan, sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), rencananya bandara ini akan dioperasikan April tahun mendatang.**

“Kami ingin memastikan progress pembangunan bandara baru Yogyakarta atau NYIA ini berjalan dengan baik. Karena ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang menurut jadwal dalam Perpres akan dioperasikan pada April tahun 2019 mendatang,” jelas Sigit saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mengunjungi Bandara NYIA, DI Yogyakarta, Jumat (26/10).

Tidak hanya itu. Komisi V DPR RI juga ingin memastikan bahwa dalam proyek pembangunan bandara tersebut memikirkan atau mempersiapkan ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Mengingat lokasi bandara tersebut tepat di bibir pantai Glagah. Sebagaimana gempa di Palu beberapa waktu lalu yang kerugiannya sekitar Rp 14,3 triliun.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo

Foto: Ayu | lod.

“Selain itu, kami juga ingin memastikan bagaimana mitigasi terhadap potensi bencana, perlu ada yang harus dipikirkkan dan dipersiapkan dari bangunan bandara. Seperti gempa dan

tsunami di Palu beberapa waktu lalu yang kerugiannya mencapai lebih dari Rp 14,3 triliun,” tambah Sigit.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama Angkasa Pura I Zufaik Fahmi yang juga didampingi oleh Direktur Teknik Angkasa Pura I Lukman F Laisa meyakini bahwa pembangunan bandara baru Yogyakarta itu berjalan dengan baik. Berbagai persiapan yang terkait pada antisipasi adanya bencana juga sudah direncanakan dengan baik lewat disain struktur bandara yang didisain untuk mitigasi terhadap tsunami dan gempa.

“Struktur bandara didesain untuk mitigasi terhadap tsunami dan gempa. Dari BMKG diperkirakan jika ada gempa di daerah tersebut tidak lebih dari 6 SR, sementara bangunan bandara dibuat untuk tahan terhadap gempa berkekuatan 8,8 SR. Begitupun tinggi gelombang tsunami yang diperkirakan tidak lebih dari 9 meter, sementara kami rencanakan bangunan ini akan mampu menahan gelombang tsunami hingga 12 meter. ■ **ayu/mp/sf**

# Komisi III Telusuri Insiden Pembakaran Polsek Bendahara

**Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dipimpin Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil meninjau Markas Kepolisian Sektor (Polsek) Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang mengalami kerusakan setelah dibakar oleh massa pada Selasa, 23 Oktober 2018 lalu. Tim Kunspek ingin mendengarkan secara seksama kronologis insiden perusakan dan pembakaran Polsek Bendahara itu.**

“Kami bersama tim akan mengawal rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Kapolda Aceh dan Kapolres Aceh Tamiang beserta jajarannya terkait insiden tersebut,” kata Nasir usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Aceh dan Kapolres Aceh Tamiang beserta jajarannya, di Mapolres Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (25/10).

Perusakan dan pembakaran Polsek Bendahara merupakan tuntutan kekesalan massa akibat salah satu warganya bernama Mahyar tewas akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Reskrim Polsek Bendahara setelah tertangkap atas kepemilikan narkotika jenis sabu.

Nasir melanjutkan, ada sejumlah langkah yang sedang ditindaklanjuti Polda Aceh dan pihaknya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan. Menurutnya, dalam konteks penegakkan hukum dan juga kerusuhan sosial, Polda Aceh dan Polres Tamiang sudah melakukan langkah persuasif guna mewujudkan kondisi yang kondusif, tapi juga melakukan pemeriksaan secara internal kepada oknum-oknum Polsek Bendahara yang diduga melakukan penganiayaan.

“Kapolda berjanji akan sampai kepada peradilan umum, bahkan mereka akan disidang dalam kode etik dan disiplin. Jadi ini sebuah langkah yang patut untuk diapresiasi dan mudah-mudahan apa yang dikatakan tadi bisa diwujudkan. Kami Komisi III



Tim Kunspek Komisi III DPR RI meninjau Polsek Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh

Foto: Rumi | od

akan mengawal langkah-langkah atau tindak lanjut yang akan dilakukan pihak penegak hukum di sini,” kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Nasir melanjutkan, insiden semacam ini tidak bisa diduga dan ini harus menjadi pelajaran bagi aparat Kepolisian agar mereka bisa lebih dekat dengan masyarakat serta membangun hubungan yang baik, sehingga masyarakat bersama Kepolisian bisa membasmi kejahatan-kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

“Karena dengan adanya hubungan baik, diharapkan pelaku kejahatan dan organisasi-organisasi kejahatan itu tidak bisa memprovokasi masyarakat dalam melawan aparat. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi seluruh aparat Kepolisian di seluruh Indonesia agar tidak lagi kita mendengar adanya pembakaran di Polres, Polsek atau Polda,” harap legislator dapil Aceh itu.

Nasir juga berharap insiden ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat dan pemerintah di daerah untuk mewujudkan sinergitas antara Kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat, sehingga kemudian bisa memberikan suasana yang kondusif dan hubungan harmonis bisa terwujud.

Di tempat yang sama, Kapolda Aceh Irjen Pol. Rio S. Djambak menyampaikan, pasca unjuk rasa yang berakhir perusakan dan pembakaran Polsek Tamiang itu, pihaknya sangat prihatin dengan adanya kejadian tersebut dan mengecek langsung yang terjadi di lokasi.

Ia menjelaskan, kasus ini bermula dari kasus kepemilikan narkoba dan benar korban yang meninggal dunia adalah pelaku narkoba.

“Saya mengakui bahwasanya tindakan penyelidikan pada kasus ini ada kesalahan prosedur dan kami akui itu salah dan kami sudah meminta maaf kepada keluarga korban. Dalam hal ini juga kami tidak menutupi ada kesalahan prosedur dan kami mengambil sikap dan petugas tersebut sudah kami bebas tugas,” jelas Kapolda Aceh.

Kapolda Aceh memastikan, Anggota Kepolisian yang melakukan kesalahan prosedur itu sudah dimutasi dalam rangka pemeriksaan.

Dan untuk pelaku perusakan Polsek Bendahara, pihaknya akan menindaklanjuti, karena ini masalah hukum pelaku. Ia menegaskan, tindakan-tindakan yang melawan hukum tidak dibenarkan. ■ rni/sf

# Komisi V Pertanyakan Pengelolaan Dana Subsidi Tol Laut



Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis meninjau Pelindo IV Makassar

**Komisi V DPR RI mendesak pemerintah melalui Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menjelaskan secara transparan mekanisme pengelolaan dana subsidi tol laut yang digunakan untuk menekan biaya pengiriman. Pasalnya, harga barang-barang di Kawasan Indonesia Timur (KIT) masih melambung tinggi.**

**D**emikian diungkapkan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik terkait masalah tol laut di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, belum lama ini.

Menurut legislator Partai Gerindra ini, mekanisme dalam pengiriman barang menggunakan tol laut terdapat temuan tidak adanya kontrol dan pengawasan dari

Foto: Iwan | lod.

# Proyek Infrastruktur Humbahas Dongkrak Pariwisata Danau Toba

**Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing mendukung percepatan berbagai proyek infrastruktur di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Provinsi Sumatera Utara, untuk meningkatkan daya tarik pariwisata di Humbahas, Danau Toba dan sekitarnya.**

**D**emikian diungkapkan Anthon saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI didampingi Bupati Humbahas, jajaran SKPD dan para mitra kerja dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi ke Kabupaten Humbahas, Sumut, Jumat (26/10).

Legislator Partai Golkar itu meyakini, dengan percepatan pembenahan infrastruktur jalan maka pariwisata yang



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau proyek infrastruktur di Kabupaten Humbahas, Sumut

ada di Kabupaten Humbahas akan menarik wisatawan domestik (dalam negeri) dalam jangka pendek dan wisatawan mancanegara (wisman) dalam jangka panjang.

“Banyak potensi yang ada di Humbahas, dipastikan menarik untuk dikunjungi wisatawan jika infrastruktur jalan sudah rampung, mulus dan bisa dilewati kendaraan

pribadi pada umumnya,” imbuh Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini.

Anthon memaparkan, banyak objek-objek wisata yang indah dan bersejarah di sini. Ada Danau Toba, Arung Jeram, Taman Bunga yang sebelumnya juga sudah pernah dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo, hingga Makam Sisingamangaraja XII.

Foto: Oedjie | lod.



Dirjen Perhubungan Laut. “Siapa yang mengontrol itu, dan apakah benar atau tidak sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri,” tanya Fary.

Lebih jauh ia mengatakan, kalau di luar negeri itu kontainer bisa langsung dideteksi tanpa harus dibuka, sementara di Indonesia tidak mempunyai alat deteksinya.

“Kalau di bandara ada dan tahu ini barangnya seperti apa. Namun kalau untuk kontainer itu tidak ada, ini harus kita pikirkan, agar tidak melanggar aturan,” ujarnya.

Menurutnya, kalau kontainer itu sudah berada di kapal tidak bisa dibuka lagi, sehingga barang yang lewat tol laut harga-harga di daerah bisa turun. Apalagi subsidi yang sudah diberikan Kementerian PUPR berkaitan dengan tol laut ini tahun 2018 sekitar Rp 447 miliar. Untuk itu diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Dijelaskan Fary, hasil kunspek terkait tol laut ini nantinya akan dibahas bersama-sama dengan mitra kerja Komisi V DPR RI. Termasuk juga info barang yang dimuat di kontainer yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Perdagangan yang seringkali sulit dilacak dan tidak terkontrol. ■ iw/mp

“Dengan panorama yang indah dan bersejarah itu, tentunya ini akan mengundang wisatawan untuk berkunjung. Maka dari itu pembangunan infrastruktur ini harus kita dorong,” papar legislator asal daerah pemilihan Sumatera Utara ini.

Sementara itu, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor usai pertemuan dengan Anggota Komisi V DPR RI berharap kedatangan Tim Kunspek Komisi V DPR RI merupakan sebuah kehormatan demi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di daerah yang dipimpinnya.

“Kami berharap, dengan adanya kunjungan Komisi V DPR ini, Kabupaten Humbahas bisa mendapatkan porsi anggaran yang memadai pada tahun 2019 nanti agar sektor pariwisata bergeliat sehingga ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan berkembang serta meningkat,” pungkash Bupati Dosmar.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ini diantaranya Anggota Komisi V DPR RI Saniatul Lativa (Golkar), Ade Rezki Pratama (Gerindra), Jhoni Allen Marbun (Demokrat), Bambang Haryo Soekartono (Gerindra), Subarna (Gerindra), Irmawan (PKB), Nurhasan Zaidi (PKS), Nurhayati (PPP), Sahat Silaban (NasDem). ■ oji/sf



Foto: Eko | oc

Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau proyek pengembangan Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin

## Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor Penuhi Target

**Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir menilai, pengembangan dan progres pembangunan Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin, di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sampai saat ini masih memenuhi target yang direncanakan. Pengembangan bandara ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), yang meliputi pekerjaan konstruksi, seperti pembangunan infrastruktur, bangunan penunjang, dan perluasan apron timur.**

“Satu hal yang kita amati, proses pembangunan masih *on target*. Insya Allah progresnya masih memenuhi target, masih *on schedule*. Kira-kira di 2019 bisa rampung untuk tahap pertama,” papar Ibnu saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau langsung proyek pengembangan Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin, di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (26/10).

Meskipun demikian pengembangan pembangunan bandara ini masih menghadapi beberapa permasalahan, di antaranya infrastruktur jalan akses menuju bandara sepanjang 21 kilometer, belum sepenuhnya siap. Ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalsel. Menurut laporan, lebar dan perkerasan jalan masih bervariasi, sehingga berpotensi mengganggu bandara baru pada saat nanti dioperasikan.

Oleh sebab itu, legislator Partai Golkar ini menyarankan agar jalan yang dimaksud menjadi jalan nasional, dengan alasan pengembangan Bandara Syamsuddin Noor merupakan PSN.

Dengan begitu, ada kucuran dana dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan jalan itu. Berdasar dari informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalsel, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 200 miliar.

“Kendala yang dihadapi itu persoalan akses jalan keluar, ini saya kira harus diselesaikan. Karena proyek ini kan PSN. Memang untuk jalan masih ditangani oleh daerah, karena masih jalan provinsi. Saya kira ke depan mesti dialihkan menjadi jalan nasional. Sehingga persoalan penyempitan di beberapa ruas jalan bisa ditangani dengan anggaran yang cukup, dan juga untuk pembebasan lahan,” jelas legislator dapil Sulawesi Barat itu.

Saat ini masih terdapat 10 kilometer jalan lingkaran utara yang belum terselesaikan dari total panjang 21 kilometer. Dinas PUPR Kalsel hanya dapat menganggarkan Rp 45 miliar pada tahun 2019 guna penyelesaian jalan tersebut, dengan catatan lebar jalan tidak seluruhnya 20 meter, ada yang 6 meter, dan terhubung dengan jalan akses masuk bandara. ■ eko/sf

# Komunikasi BPJS Kesehatan - RS di Lampung Sangat Baik

**Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus menilai komunikasi yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit yang ada di Provinsi Lampung berjalan dengan sangat baik.**

“Ini merupakan sebuah pelajaran, saya lihat ini pelajaran yang terbaik adalah bahwa perlunya ada komunikasi dan koordinasi antar pada *stakeholder* kesehatan terkait dengan pelayanan jaminan kesehatan ini,” ujar Ichsan yang memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Jumat (26/10).

Komisi IX DPR RI memperdalam dampak terbitnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3 dan 5 terkhusus di Provinsi Lampung. Hampir di seluruh Indonesia terdampak terhadap pelayanan masyarakat oleh rumah sakit. Kemudian pada tanggal 18 Oktober

2018 lalu, terbitlah keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menerima gugatan uji materiil dari Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) tentang permohonan pencabutan Perdirjampelkes tersebut.

“Kelihatannya di Provinsi Lampung ini karena ada komunikasi yang baik antara BPJS Kesehatan, Rumah Sakit, dan Dinas Kesehatan yang cukup baik koordinasinya. Kami melihat memang persoalan-persoalan dampak dari terbitnya peraturan itu bisa diantisipasi,” terang legislator Partai Golkar itu.

“Saya lihat memang di pusat itu komunikasi antara *stakeholder* mulai dari Kementerian Kesehatan, Direksi BPJS Kesehatan, dan para *stakeholder* lain itu

masih kurang baik,” tambah Ichsan.

Berkaca dari pengamalan Kunspek ini, legislator dapil Jawa Barat V itu menyimpulkan dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, persoalan dan dampak akibat peraturan direksi itu bisa diantisipasi.

Pada Kunspek ini, Komisi IX DPR RI melakukan pertemuan dengan Plt. Setda Lampung, Ka. Kanwil BPJS Kesehatan Lampung, Ka. Dinkes Prov. Lampung, Dirut Rumah Sakit Se-Bandar Lampung, IDI Lampung membahas tentang pengawasan JKN pasca terbitkan 3 Perdirkelpes BPJS Kesehatan.

Kunspek Komisi IX DPR RI diikuti Anggota Komisi IX DPR RI Budi Yuwono (F-PDI Perjuangan), Yayat Biaro, Julianus Pote Leba (F-Golkar) Suir Syam, Sumarjati Arjoso (F-Gerindra) Zulfikar Achmad (F-Demokrat), Hang Ahli Saputra Syah Pahan (F-PAN), Aryanto Munawar (F-PKB), dan Irma Suryani (F-NasDem).

■ es/mp/sf



Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke Bandar Lampung, Provinsi Lampung dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus

Foto: Erman | od.

# Komisi IX Pastikan Program JKN-KIS Berjalan Baik



Foto: Tiara | lod

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay memimpin Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke Medan, Sumut

**Komisi IX DPR RI memastikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tetap berjalan baik. Hal ini seiring pasca terbitnya keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menerima gugatan uji materiil dari Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) tentang permohonan pencabutan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) pada tanggal 18 Oktober 2018.**

“Komisi IX DPR RI memandang sangat penting untuk melakukan pengawasan terkait hal tersebut agar pelaksanaan program JKN-KIS tetap berjalan baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan BPJS Kesehatan, perwakilan Rumah Sakit (RS) Swasta dan Pusat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (26/10).

Dengan adanya putusan MA itu, Saleh menilai BPJS Kesehatan sudah tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan aturan pembatasan layanan yang tertuang pada aturan Perdirjampelkes itu.

“Artinya bahwa memang peraturan tersebut harus segera disesuaikan dengan putusan MA dalam waktu 90 hari sejak keputusan tersebut

dikeluarkan. Kedepannya tidak boleh lagi ada pembatasan-pembatasan akses masyarakat terhadap kesehatan,” tegas Saleh.

Dalam menjalankan program JKN-KIS, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan BPJS Kesehatan mengalami beberapa hambatan salah satunya adalah persoalan defisit. Sejak diselenggarakannya program JKN-KIS tersebut, BPJS Kesehatan telah mengalami defisit yang cukup besar yaitu sebesar Rp 44,2 triliun.

“Untuk itu bentuk rekomendasi yang sudah kami berikan kepada pemerintah adalah menyesuaikan iuran berdasarkan aktuarialnya sesungguhnya. Karena sekarang aktuarialnya sangat kecil, dan tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan. Kami berharap agar BPJS Kesehatan ini nantinya bisa memperbaiki sistem manajemen terutama dari sistem kepesertaannya,” tandas politisi daerah

pemilihan (dapil) Sumut itu.

Untuk diketahui, BPJS Kesehatan menerbitkan tiga Perdirjampelkes sebagai upaya dalam melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelayanan yang dijamin dalam program JKN. Ketiga aturan baru tersebut yakni Peraturan Dirjen (Perdir) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan, Perdir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Lahir Sehat, serta Perdir Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Penyebab defisit/*mismatch* yang dialami oleh BPJS Kesehatan pada umumnya disebabkan oleh nilai premi yang belum menggunakan perhitungan aktuarial secara penuh. Selain itu terdapat perubahan pola penyakit di masyarakat yaitu meningkatnya penyakit katastrofik. Jumlah biaya penyakit katastrofik pada tahun 2016 sebesar Rp 14,692 triliun. ■ tra/sf

# Komisi VII Dorong KLHK Kaji Limbah TBBM Pertamina



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir memimpin Kunspek Panja Limbah dan Lingkungan Hidup meninjau penampungan limbah B3 di TBBM PT. Pertamina Tanjung Uban

**Komisi VII DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam proses pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan oleh Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT. Pertamina Tanjung Uban. Pengelolaan limbah B3 tidak boleh sembarangan dikelola oleh perusahaan, jika belum diuji dan disertifikasi oleh KLHK.**

**H**al ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Hidup Komisi VII DPR RI mendengarkan paparan pengelolaan limbah dan meninjau langsung tempat penampungan limbah B3 di TBBM PT. Pertamina Tanjung Uban, Pulau Bintan, Kabupaten Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (25/10).

“Kita akan melihat lebih lanjut dan memerintahkan Dirjen Gakkum KLHK untuk melakukan pendalaman dari proses pengelolaan limbah yang ada di PT Pertamina, khususnya di Pertamina Tanjung Uban ini. Ini yang akan kita minta

kepada pemerintah agar kita tahu siapa yang harusnya mengelola limbah dan siapa yang harus memusnahkan limbah, jangan sampai proses pengelolaan limbah ini salah,” terang Nasir, usai pertemuan.

Selain itu, legislator Partai Demokrat mendorong KLHK untuk turut aktif dalam *tender* pengelolaan limbah PT. Pertamina, agar pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh TBBM Pertamina Tanjung Uban dapat dilakukan secara benar dan sesuai dengan prosedur. KLHK pun diminta untuk memeriksa izin-izin perusahaan yang mengajukan diri untuk mengelola limbah, sehingga dapat diyakini perusahaan tersebut memang *capable* dalam mengolah

limbah B3 menjadi bahan baku, serta tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan sekitar.

“Kita minta dari instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalau nanti ditemukan kejanggalan, ya kita minta diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau memang sudah memenuhi baku mutu dan tidak berdampak pada lingkungan, ya berarti PT. Pertamina dan perusahaan pengelola limbahnya sudah memproses limbah dengan benar,” kata legislator dapil Riau II itu.

Nasir pun mengingatkan PT. Pertamina yang merupakan perusahaan pelat merah untuk mentaati Undang-Undang yang berlaku dalam hal pengelolaan limbah B3. Menurutnya jika PT. Pertamina melanggar aturan pengelolaan limbah sebagaimana yang tercantum pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perusahaan tersebut harus diselidiki dan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. ■ nap/sf



# Revisi UU BPK, Komisi XI Jaring Masukan Civitas Akademika Unair

**Untuk mendapatkan masukan yang komprehensif terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi XI DPR RI menjaring masukan dari civitas akademika Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengaku, pihaknya menerima banyak sekali masukan dari civitas akademika Unair.**

BPK itu sendiri, agar menciptakan BPK yang *powerfull*, mandiri, dan dapat terus dipercaya utamanya soal putusan-putusan hasil pemeriksaannya.

“Karena saat ini, masyarakat suka bertanya ketika melihat banyaknya kasus OTT terhadap pejabat daerah yang notabene semuanya itu sudah mendapat WTP dari BPK, jadi banyak mengeluh ‘dapat WTP tahunya kena OTT’. Nah, harapan kita ke depan setelah kita memberi kewenangan itu, kita juga akan memberi rambu-rambu buat BPK dan juga tanggung jawab,” kata legislator PKB itu.

Legislator dapil Lampung itu juga menekankan bahwa tanggung jawab BPK adalah ketika sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang jenisnya opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka hal itu harus dipertanggungjawabkan.

Kunspek ini juga diikuti oleh Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia dan Andreas Eddy Susetyo dari F-PDI Perjuangan, Muhammad Misbakhun (F-PG), Willgo Zainar dan Harry Poernomo dari F-Gerindra, Tutik Kusuma Wardani (F-Demokrat), Alamuddin Dimiyati Rois (F-PKB), dan Elviana (F-PPP). ■ ndy/sf

Substansi-substansi masalah sudah disampaikan, seperti tentang kewenangan, kolektif kolegial, putusan Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya.

Jadi saya kira ini menambah khazanah Komisi XI DPR RI untuk membahas lebih komprehensif revisi UU BPK ini,” ujarnya usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan jajaran BPK Provinsi Jawa Timur dan civitas akademika Unair, di Surabaya, Jatim, Kamis (25/10).

Lebih lanjut, Soepriyatno memastikan, sudah tidak ada pasal krusial yang perlu ditambahkan ataupun direvisi. Menurutnya revisi UU BPK ini untuk melengkapi UU yang sudah ada saat ini. Karena menurutnya, dalam berjalannya pemerintahan, UU ini harus direvisi.

Mengingat ada beberapa pasal yang sudah tidak sesuai lagi dengan implementasi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Legislator Partai Gerindra itu juga menegaskan, revisi UU BPK ini agar membuat BPK menjadi suatu lembaga negara yang independen, kredibel dan mandiri. “Kemudian bisa memberikan dan menjadikan BPK sebagai auditor negara yang kredibel, mandiri dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena penting untuk pengelolaan keuangan negara dalam waktu yang akan datang,” tandas legislator dapil Jawa Timur II itu.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Nur Chayati berharap, dengan adanya revisi UU BPK ini dapat meningkatkan kewenangan daripada



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno memimpin Tim Kunspek Komisi XI DPR RI pertemuan dengan BPK dan civitas akademika Universitas Airlangga

Foto: Nadya Iod

# Panja RUU Perubahan BPK Gali Informasi di Universitas Indonesia

**Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK), Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Universitas Indonesia (UI), guna mencari informasi dan masukan untuk penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut.**

Wakil Komisi XI DPR RI Achmad Hafiz Tohir di hadapan narasumber dan civitas akademika UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (25/10) mengungkapkan, Rapat Konsultasi DPR RI memutuskan bahwa Komisi XI DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tersebut.

Menurut Hafiz, BPK merupakan salah satu lembaga negara yang bebas dan mandiri yang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara, dalam menjalankan aktifitasnya BPK masih menggunakan UU Nomor 15 Tahun 2006. Namun demikian UU tersebut belum bisa mengakomodasi kebutuhan BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab mengelola keuangan negara.

Di samping itu, Hafiz juga menjelaskan bahwa, lahirnya UU Nomor 15 Tahun 2006 tersebut, merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 5 tahun 1973 tentang BPK, dan sekaligus dalam melaksanakan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pada saat lahirnya UU tersebut, kedudukan BPK menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu diharapkan BPK akan menjadi lembaga pemeriksa eksternal yang bebas dan mandiri. Namun demikian perkembangannya, UU BPK ternyata masih perlu disempurnakan karena masih ada kelemahan dari UU tersebut, antara lain mengenai perhitungan kerugian negara, sifat kolektif kolegial dari keanggotaan BPK termasuk mekanisme pemilihan Anggota BPK.

Selain itu, UU tersebut pernah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat dan mekanisme jabatan anggota pengganti. Keputusan MK tersebut tegas mengatakan bahwa pemilihan anggota BPK harus untuk jabatan 5 tahun sehingga ada kekosongan hukum dalam pengaturannya yang mengharuskan pergantian antar waktu.



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafiz Tohir

Oleh karena itu, UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dipandang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini. Karena itu perlu diganti dan disempurnakan dengan UU yang baru guna mendukung terwujudnya suatu lembaga pemeriksa yang bebas mandiri dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Dalam kesempatan kunjungan kerja hari ini, kami berharap mendapatkan masukan seluas mungkin dari kalangan akademisi UI agar RUU yang akan kami bahas ini sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu dapat *up to date* dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang,” ungkap legislator PAN itu.

Eko Prasojito, salah seorang narasumber Universitas Indonesia mengatakan BPK merupakan organ yang sangat berkuasa dan kuasanya harus digunakan untuk perubahan penting negara.

Karena hasil temuannya itu untuk digunakan aparat penegak hukum menindaklanjuti dalam tindak pidana. “Menurut saya kekuasaan BPK ini harus bisa digunakan untuk mewujudkan negara yang transparan dan akuntabel,” jelas Eko.

Dijelaskan, perlu diusahakan

bagaimana menyelaraskan antara *performance* audit dengan *complainte* audit dengan sistem negara secara keseluruhan, karena UU Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini akan memperkuat apa yang dimaksud dengan inspektur nasional. Para Irjen kemudian Inspekturat Kabupaten Kota secara akuntabel kepada inspektur nasional yang langsung berada di presiden.

“Jadi memang pengawasan internal ini adalah bagaimana membangun profesionalisme, kemandirian, terhadap pengawas aparat pengawas pemerintah. Sehingga penyusunan revisi UU BPK ini harus juga selaras dengan keinginan memperkuat sistem pengawasan pemerintah yang dilakukan oleh APIP,” jelas dia dengan menambahkan, supaya pengawasan dilakukan APIP tidak lagi tergantung pada kekuatan politik dari para menteri atau gubernur atau walikota.

Pasalnya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ini kalau sudah dengan kepentingan-kepentingan yang lebih luas biasanya tidak menjadi independen itu. “Kami dengar bahwa pemerintah mempersiapkan agenda prolegnas tahun depan mungkin di tahun terakhir, supaya mencegah terjadinya banyak penyalahgunaan wewenang di pemerintahan.” imbuh Eko. ■ hr/mp/sf



Foto: Agung | rni

Tim Kunspek Komisi XI DPR RI berfoto bersama dengan Akademisi Universitas Hasanudin Makassar

# Revisi UU BPK, Legislator Harap Pengelolaan Keuangan Negara Lebih Baik

**DPR RI bersama pemerintah telah bersepakat untuk melakukan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan berharap melalui amandemen ini, BPK sebagai badan pemeriksa keuangan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.**

yang diatur UU dalam rangka menguatkan fungsi peran dan Tupoksi BPK, kami hadir ke Makassar meminta masukan dari Universitas Hasanudin untuk menyempurnakan DIM yang akan dibuat oleh masing-masing fraksi sehingga dapat lebih komprehensif,” katanya.

Lebih lanjut, Hergun-panggilan akrabnya mengharapkan dengan amandemen BPK dapat memperkuat tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga tinggi negara yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

“Kami berharap BPK ke depan bisa kita kuatkan kembali melalui amandemen UU BPK, khususnya terkait masalah tupoksinya. Karena selama ini dikatakan BPK untuk menyelamatkan keuangan negara dan terkait masalah kerugian negara,” paparnya. ■ as/mp

“ Kami (Komisi XI) ingin memberikan dan mengembalikan BPK pada tupoksinya, pada peran dan fungsi BPK sebagai badan pemeriksa keuangan yang indenpeden dan lebih baik lagi. Sehingga keberadaan BPK sebagai badan pemeriksa keuangan bisa lebih baik, dapat mendorong terjadinya *good goverment* yang bisa dijalankan oleh entitas yang diperiksa BPK,” katanya di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (25/10), guna menghimpun masukan dari Akademisi Universitas Hasanudin.

Menurut politisi Gerindra ini, pada bulan Juli 2018 Komisi XI mendapatkan penugasan dengan adanya permohonan pengajuan untuk mengamandemen UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dari Pemerintah.

Namun hingga kini naskah Akademik (NA) dari belum disampaikan kepada Komisi yang bermitra dengan BPK ini. Komisi XI berharap NA dapat segera diterima Komisi XI agar lebih gampang DPR untuk mengetahui tujuan dan rencana Amandemen UU BPK.

“Untuk itu, sebagai mitra kami di Komisi XI, sebuah lembaga independen

# UU Kekarantinaan Kesehatan Lindungi Masyarakat dari Penyakit Luar Negeri

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mensosialisasikan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat. Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan, UU Kekarantinaan Kesehatan ini penting untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dari kemungkinan terjangkitnya penyakit yang dibawa dari luar negeri.



Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhammad Sarmuji bertukar cenderamata dengan Gubernur Kalbar

“Kalbar yang memiliki pos lintas batas negara, penting untuk pertama kali mengetahui supaya masyarakat dan semua pemangku kepentingan mempersiapkan diri terhadap pelaksanaan UU ini,” kata Sarmuji saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Baleg DPR RI dengan Gubernur Kalbar beserta jajaran dan masyarakat Kalbar, di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (25/10).

Menurut legislator Partai Golkar itu, dalam dialog terungkap masukan tentang detail-detail pelaksanaan UU. Diantaranya bagaimana orang asing masuk wilayah Kalbar yang tidak melewati pos lintas batas, tapi melalui jalur tikus. Termasuk bagaimana dengan penindakan dari aparat yang tidak berwenang, seperti Bea Cukai atas kasus tersebut.

“Kami mengapresiasi masukan dari Gubernur dan masyarakat Kalbar atas UU ini, dan menjadi masukan untuk penyusunan PP (Peraturan Pemerintah), sehingga terimplementasi dengan baik. Masukan ini sangat berguna, karena akan

Foto: Mastur Iod

## Pemerintah Didorong Segera Terbitkan Aturan Pelaksana UU Kekarantinaan Kesehatan



Wakil Ketua Baleg DPR RI Arif Wibowo memimpin Tim Kunker Baleg DPR RI berfoto bersama Pemprov Kepri

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Arif Wibowo berharap dengan adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksanaannya. Arif menilai, banyak UU yang peraturan pelaksanaannya belum terbit, padahal ada kebutuhan hukum dan kebutuhan teknis agar UU tersebut dapat dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Kalau peraturan teknisnya saja tidak terbit, berarti UU tersebut tidak bisa dilaksanakan,” ujar Arif saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran Forkopimda, Kementerian

Foto: Kresno Iod

ada PP maupun Permenkes. Detail-detail di lapangan akan memberi warna dan gaya penyusunan PP,” kata Sarmudji.

Menanggapi saran Gubernur agar setelah UU diundangkan dan dilanjutkan penyusunan PP, perlu diaturnya penyediaan peralatan canggih di wilayah perbatasan, Sarmuji menyambut baik masukan tersebut. Sebab mendeteksi wabah penyakit tidak cukup hanya mengandalkan insting. Harapan Gubernur itu perlu diperhatikan, dan diharapkan pemerintah pusat menyiapkan infrastruktur, sehingga pos-pos perbatasan dilengkapi alat-alat canggih.

Lebih lanjut Sarmuji menekankan bahwa secara normatif penyusunan PP dibatasi maksimal tiga tahun, namun mengingat urgensi dari UU ini, maka diharapkan PP dan Permenkes segera terbit dan Baleg akan terus mengawalinya. “Maksimal 3 tahun, tapi akan kita kejar sesegera mungkin,” tandas legislator dapil Jawa Timur itu.

Kunker ini juga diikuti oleh Anggota Baleg DPR RI Junimart Girsang (F-PDI Perjuangan), Mohammad Suryo Alam (F-PG), Ramson Siagian (F-Gerindra), Neng Eem Marhamah Zulfa (F-PKB), serta Adang Darajatun dan Ledia Hanifa Amaliah dari F-PKS. ■ mp/sf

Hukum dan HAM Kanwil Kepri, serta beberapa jajaran pejabat daerah dan dinas kesehatan di Batam, Kepri, Kamis (25/10).

Baleg bersama dengan Kementerian Kesehatan mengunjungi Batam yang merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dengan Singapura, bertujuan untuk mensosialisasikan UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang bulan Juli 2018 lalu saja disahkan di Rapat Paripurna. Arif menjelaskan, UU ini dibuat untuk mengintegrasikan UU Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara.

“Dengan adanya sosialisasi ini untuk memberikan informasi sekaligus pemahaman kepada berbagai kalangan dan stakeholder yang ada di wilayah Batam yang merupakan daerah lalu lintas barang dan jasa dari luar negeri, yang rawan bagi masalah kesehatan. Ini merupakan langkah antisipatif dalam membentengi kehidupan masyarakat terutama dalam segi kesehatan,” ujar legislator PDI-Perjuangan itu. ■ eno/sf



Tim Kunker Baleg DPR RI bertukar cenderamata dengan Wagub Sulawesi Utara

Foto: Artief | od

## Baleg Sosialisasi UU Kekarantinaan Kesehatan di Sulut

**Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan bibir Pasifik dalam era hubungan internasional yang semakin terbuka, menjadi garda terdepan Indonesia. Oleh karena, itu Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan untuk memproteksi terhadap berbagai kemungkinan ancaman adanya penyakit dan lainnya yang masuk ke wilayah Republik Indonesia.**

“Kehadiran kami di sini yang berada di garda terdepan, bersama Bea Cukai, Imigrasi dan lainnya, sangat *care* dengan tugasnya sebagai pelindung menjaga bangsa ini dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit menular,” kata Anggota Baleg DPR RI Luthfi Andi Mutty usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan Wakil Gubernur Sulawesi Utara beserta jajarannya, di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Kamis (25/10).

Legislator Partai NasDem ini menambahkan UU Kekarantinaan Kesehatan baru disahkan oleh DPR RI belum lama ini, sehingga aturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) belum terbit. Maka, lanjut Luthfi, kehadiran Baleg di Sulut ini juga sekaligus meminta masukan dari pelaksana tugas di lapangan, seperti pengelola perbatasan, Bea Cukai, Imigrasi dan lainnya.

“Undang-undang dilaksanakan dengan aturan pelaksanaan, bisa dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Maka Baleg DPR RI berharap muatan dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan terbit nanti agar semakin memperkaya dan memperkuat UU tentang Kekarantinaan Kesehatan dan bisa langsung diaplikasikan di lapangan,” imbuh legislator dapil Sulawesi Selatan itu.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw mengatakan, letak geografis Sulut memposisikan kawasan ini sebagai penghubung Kawasan Indonesia Timur dengan Kawasan Pasifik dan merupakan wilayah lalu lintas orang dan barang, sehingga penerapan UU Kekarantinaan Kesehatan dinilai tepat.

“Atas nama Pak Gubernur, kami mengapresiasi kunjungan kerja Baleg karena Sulut menjadi salah satu lokasi awal yang dipilih. Dan saya berharap melalui momentum ini, Baleg DPR RI dapat memberikan informasi dan gagasan penting untuk meningkatkan kapasitas dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2018 ini di Sulut,” harap Wagub Steven. ■ afr/sf

# MKD Serap Masukan Penyempurnaan Kode Etik dan Tata Beracara



Foto: Soerya | od.

Tim Kunker MKD DPR RI foto bersama Jajaran Polda dan Kejati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk mendalami dan mengkaji Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD. Dengan Harapan, Polda dan Kejati Babel dapat memberi masukan untuk penyempurnaan Kode Etik dan Tata Beracara MKD itu.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua MKD DPR RI TB. Soenmandjaja saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) MKD DPR RI dengan Wakapolda Babel Kombes Pol Djoko Erwanto beserta jajaran, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Babel Aditya Warman beserta jajaran di Babel, Rabu (24/10). Kunker ini dipimpin oleh Wakil Ketua MKD DPR RI Sarifudin Sudding (F-Hanura).

Soenmandjaja menambahkan, Kepolisian

# Pansus RUU Daerah Kepulauan Serap Aspirasi Masyarakat Babel

**Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) , Rabu (24/10). Dalam Kunker ini, Pansus ingin menyerap aspirasi mengenai RUU yang tengah digodok DPR RI ini dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun masyarakat.**

menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini akan dilanjutkan ke daerah kepulauan lainnya di Indonesia. Seluruh masukan dari pemda kepulauan mengenai RUU ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam

Pada pertemuan tersebut, Pansus menyampaikan sejumlah pertanyaan dan pemprov diharapkan dapat menyampaikan jawaban secara tertulis. Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan Edison Betaubun menanyakan berbagai isu strategis mengenai peran pemerintah daerah (pemda) saat ini, di sektor-sektor yang menjadi khas daerah kepulauan.

“Pengelolaan potensi sektor kelautan dan perikanan selama ini, infrastruktur pendukung yang ada, bagaimana pemerintah daerah mengelola potensi ini dari sisi bidang perhubungan, energi dan sumber daya mineral, serta pendidikan tingginya,” ujarnya dalam rapat yang di gelar di Kantor Gubernur Babel itu.

Legislator Partai Golkar ini



Foto: Erlangga | od.

Tim Pansus RUU Daerah Kepulauan saat Kunker ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

maupun Kejati merupakan lembaga yang fokus pada bidang penegakan hukum, sehingga memiliki pengalaman yang lebih. “Karena itu, kami mohon kebesaran jiwa dan keluangan waktu untuk membaca dan mendalami aturan Kode Etik dan Tata Beracara MKD ini. Manakala ada yang perlu disempurnakan, dengan senang hati kami akan menerima usul, saran dan masukannya,” kata Soenmandjaja.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara MKD kepada penegak hukum di daerah ini penting, karena 560 Anggota Dewan yang tersebar di 77 dapil ini diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta menjaga nilai-nilai etika, nilai kepastian dan kepatutan yang ada di tengah masyarakat.

“MKD mengharapkan kerja sama dengan jajaran Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, untuk memberikan masukan dan mensosialisasikan tentang bagaimana Kode Etik dan Tata Beracara yang baik dalam rangka tugas-tugas yang dapat dilakukan secara profesional dan penuh dengan tanggung jawab sebagai wakil rakyat,” kata legislator dapil Jawa Barat itu. ■ soe/sf

pembahasan dengan pemerintah pusat.

“Selama masa pembahasan RUU, masukan pemerintah daerah penting karena dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui mengenai daerahnya masing-masing. Ini bukan barang baru karena hal ini sebenarnya sudah dibahas sejak lama,” tandas legislator dapil Maluku tersebut.

Sementara itu, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Rahmat Robuwan menyatakan perlu ada kajian lebih dalam lagi yang harus dilakukan dalam pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Khususnya terkait sinkronisasi antara RUU tersebut dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pembahasan juga perlu mengkaji lebih dalam urgensi atau tujuan RUU ini disahkan. Hal yang juga sangat perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU ini adalah mengenai apa yang disebut sebagai desentralisasi asimetris karena seharusnya kita sebagai negara kesatuan berarti setiap daerah harus setara,” tutur Rahmat.

Kunker Pansus RUU Daerah Kepulauan ke Babel ini juga diikuti sejumlah Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan, diantaranya Melda Adriani (F-PG), Libert Kristo Ibo (F-PD) Siti Sarwindah (F-PAN), dan Tamanuri (F-NasDem). ■ eps/sf

## DPR Segera Tuntaskan RUU Daerah Kepulauan



Tim Kunker Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI foto bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef A. Nae Soi

Foto: Rizka | od

**DPR RI berkeinginan kuat untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan Wenny Warouw mengatakan, dalam rapat Pansus, semua fraksi sepakat dan setuju agar RUU ini secepatnya ditetapkan jadi Undang-Undang.**

Hal ini terungkap dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef A. Nae Soi beserta jajaran di Kantor Gubernur NTT, Kupang, Rabu (24/10). “Saya sudah minta teman-teman agar dalam tiga bulan RUU ini dapat diselesaikan, karena UU ini penting untuk masyarakat kepulauan, khususnya yang ada NTT dan Indonesia Timur. Dari 85 kabupaten/kota kepulauan, ada 22 di sini. Bayangkan kalau 22 kabupaten/kota ini diberlakukan tidak sama dengan daerah (Indonesia) Tengah dan Barat, kapan majunya?” kata Wenny.

Menurut legislator Partai Gerindra ini, RUU Daerah Kepulauan merupakan bentuk perhatian khusus terhadap masyarakat pesisir, terutama untuk mendukung poros maritim yang dicanangkan pemerintah. “Kita harapkan dengan RUU ini, ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Pendidikan dan pergaulannya juga semakin baik,” harap Wenny.

Legislator dapil Sulawesi Utara ini menambahkan, Kunker ini guna menyerap masukan, supaya pendekatan tentang filosofi pendekatan tentang keamanan daerah kepulauan terakomodir dalam RUU ini. “Misal ada pulau di sini punya kita, tapi ada kejadian Anggota DPR tidak boleh masuk. Kemudian sudah punya sumber daya, diolah tetapi hasilnya tidak dinikmati oleh penduduk sini. Maka perlu diatur dengan RUU ini,” ungkap Wenny.

Hal ini dibenarkan oleh Wagub NTT Josef A. Nae Soi. Sebagai masukan darinya, bahwa perlu ada regulasi yang jelas untuk mempercepat proses pembangunan daerah kepulauan. Menurutnya, pengaturan ini diharapkan mempercepat pembangunan di daerah-daerah kepulauan yang selama ini masih terjadi kemiskinan.

“Dengan undang-undang ini, diharapkan dapat mempercepat pembangunan. Artinya pemerintah pusat akan memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah kepulauan, dari sudut SDM-nya, dari sudut pemberdayaan ekonomi dan wujud pembiayaannya supaya bisa dihitung,” jelas Josef.

Menanggapi hal ini, Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan Ahmad Yohan mengatakan bahwa RUU ini menjadi harapan masyarakat NTT. “Memang keinginan agar perhatian pemerintah benar-benar sampai di daerah kepulauan yang selama ini tertinggal, padahal sebagian wilayah kepulauan ini berada di posisi terluar,” ujar legislator Partai Amanat Nasional (PAN). ■ ran/sf

# Pansus RUU Daerah Kepulauan Terima Masukan Pemprov Sultra

**Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI mendapatkan banyak masukan penting dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan Amir Uskara mengatakan, ada hal-hal khusus yang Pansus dapatkan, yakni masukan yang belum tercantum dalam RUU Kepulauan, tetapi menjadi persoalan yang terjadi di daerah, terutama di daerah-daerah kepulauan yang ada di Sultra.**

selesai. Masalah Undang-Undang Daerah Kepulauan ini sendiri sudah dibahas selama 13 tahun dan belum tuntas,” jelas legislator dapil Sulawesi Selatan itu.

Anggota Komisi XI DPR RI itu berharap dapat menyelesaikan RUU Daerah Kepulauan tersebut menjadi sebuah UU.

“RUU ini akan menjadi sebuah undang-undang yang mengatur tentang skema pembiayaan untuk daerah kepulauan serta kewenangan yang akan diberikan kepada Kabupaten/Kota Kepulauan maupun Provinsi Kepulauan,” pungkasnya.

Ia juga menambahkan, dalam membuat peraturan perundang-undangan seringkali terjadi tumpang tindih (overlapping) peraturan. Tetapi semua itu akan kembali diatur melalui proses sinkronisasi.

“Apabila ada peraturan perundang-undangan yang menghalangi atau bertentangan, biasanya dibatalkan dengan adanya undang-undang yang terbaru,” ujarnya. ■ dep/sf

“Apa yang sudah disampaikan dalam pertemuan (antara Pansus RUU Daerah Kepulauan dengan jajaran Pemerintah Provinsi) ini akan menjadi bahan referensi pembahasan bagi Pansus RUU Daerah Kepulauan dan juga pemerintah,” ucap Amir usai memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI dengan jajaran Pemprov Sultra, di Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Rabu (24/10).

Dikatakan legislator PPP itu, terkait definisi dan kriteria untuk menjadi daerah kepulauan, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota masih akan menunggu masukan dari beberapa daerah kepulauan yang memang memahami dan mengerti betul mengenai masalah kepulauan tersebut.

“Sehubungan dengan masalah target waktu penyelesaian RUU ini, kita memang tidak bisa memprediksi waktu kapan



Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan Amir Uskara

Foto: Dep/In



Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha

Foto: Azka | In

## Ittama DPR Gelar Forum APIP

**Inspektorat Utama (Ittama) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menggelar Forum Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Rangka Penguatan Kelembagaan (Good Corporate) dan Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance).**

Saat membuka forum ini di Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/10) Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha mengatakan, forum ini diselenggarakan secara intern oleh Ittama yang nantinya menghasilkan pemahaman terhadap suatu kebijakan pengawasan di tahun 2019.

Totok, sapaan akrab Setyanta menjelaskan, Ittama DPR RI akan menyusun suatu kebijakan pengawasan

yang nantinya akan menjadi dasar di dalam menyusun program-program kegiatan pengawasan tahunan, sehingga apa yang Ittama lakukan ini akan sejalan dengan visi dan misi organisasi.

“Konteks pengawasan dalam perspektif ini adalah *quality assurances* dan *early warning*, jadi bertujuan untuk menjamin kualitas dari suatu kegiatan dan yang kedua adalah peringatan dini terhadap beberapa kemungkinan terjadinya potensi

# DPR Raih *Stand Terbaik Legal Expo 2018*

**Stand DPR RI persembahkan Bagian Humas, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR RI berhasil meraih predikat *Stand Terbaik* dalam acara *Legal Expo 2018*, yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Kamis-Jumat (25-26/10).**



Kabag Humas Setjen dan BK DPR RI Minarni memberikan cenderamata kepada Menkumham

“Atas kerja sama semua pihak, alhamdulillah *stand DPR* mendapat predikat *stand terbaik* harapan satu dengan kategori pengunjung, inovasi serta tampilan *stand* yang sesuai dengan tema *Legal Expo ‘Pelayanan Pembangunan Hukum di Era Digital’*,” ungkap Kepala Bagian Humas Setjen dan BK DPR RI Minarni, di kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Jumat (26/10).

*Legal Expo* yang digelar Kemenkum HAM ini diikuti 30 instansi lembaga negara dan institusi itu, merupakan ajang yang menampilkan kinerja, inovasi, kreativitas dan sinergi untuk meningkatkan pelayanan di masyarakat. Dengan tujuan

menunjukkan kepada publik akan eksistensi dan kinerja.

“Melalui kegiatan ini, DPR berupaya menyediakan sarana prasana informasi mengenai tugas dan fungsi Anggota DPR kepada masyarakat secara langsung melalui *challenge* pengetahuan tentang DPR,” jelas Minarni.

Minarni menjelaskan, *stand DPR RI* menjadi salah satu yang diminati pengunjung *Legal Expo*. Terbukti hingga akhir pameran, tercatat 1177 pengunjung dari 2000 pengunjung singgah di *stand DPR RI* untuk mencoba *DPR Challenge*.

“Dengan banyaknya pengunjung yang datang, berarti *stand* kita diapresiasi banyak masyarakat. Melalui *DPR Challenge* ini, masyarakat akan memahami dengan sendirinya tugas dan fungsi DPR,” tutur Minarni.

Selain itu, pengunjung juga diajak untuk men-*follow* beberapa akun media sosial DPR RI hingga men-*download* aplikasi *DPR Now!*.

“Di era digital ini, DPR terus berinovasi menyediakan layanan yang mudah diakses oleh masyarakat, hal ini tidak lain agar DPR lebih dikenal oleh masyarakat,” tegasnya.

Minarni mengatakan, pihaknya berharap dengan predikat ini dapat menjadi pemicu semangat bagi Bagian Humas DPR RI untuk semakin kreatif dan inovatif dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya dibidang informasi. ■ [rnm/sf](#)

penyimpangan didalam penggunaan keuangan negara,” tutur Totok.

Totok melanjutkan, tujuan akhir dari hal tersebut adalah terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*) di lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang berujung dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan di lingkup Setjen dan BK DPR RI.

Pasalnya, setiap kebijakan itu kerap kali secara lisan dan tidak terdokumen. Oleh karena itu, Ittama mengawali ini semua, bahwa segala kebijakan itu harus terdokumen dan legal dalam bentuk peraturan, hal itu merupakan suatu norma dasar bagi berlangsungnya suatu kegiatan.

“Kami baru berumur 3 tahun tetapi ada beberapa kendala yang sedang kami hadapi, misalnya dalam perubahan *mindset* karena tidak serta merta dapat diubah, pasti perlu ada proses. Kemudian SDM, dari segi kuantitas kami masih kekurangan banyak

auditor. Saat ini kami memiliki 17 auditor yang *existing* secara kualitas itu sudah baik, karena semua sudah terverifikasi,” papar Totok.

Padaحال, lanjut Totok, menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk entitas di Setjen dan BK DPR RI ini perlu 3 Gugus Tugas, dan 1 Gugus Tugas diisi oleh 13 auditor. “Kebutuhan auditor itu ada 65 orang, tetapi sekarang baru ada 17 orang. Itu suatu kendala yang serius. Untuk memenuhi auditor itu memang secara bertahap. Untuk tahun ini kita mendapat alokasi 11 orang auditor dan 9 orang di *Tata Usaha*,” sela Totok.

Bagian *Tata Usaha* juga tidak kalah pentingnya dengan auditor, karena bagian tersebut yang akan menindaklanjuti setiap temuan hasil pengawasan, apakah itu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau dari Inspektorat. Kebijakan pengawasan tersebut akan menjadi acuan Program

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang menjadi fokus pengawasan.

“Tentu nanti kebijakan ini akan dituangkan dalam satu regulasi intern, yakni regulasi inspektur utama yang menjadi landasan untuk pembuatan PKPT, yang pada akhirnya hasil dari pengawasan kami ini akan menjadi nilai tambah bagi organisasi,” harap Totok.

Untuk itu, Totok berharap ke depannya, anggaran akan disesuaikan dengan volume kegiatan dan kebutuhan akan kegiatan, yang kedua adanya suatu kepercayaan dari unit-unit kerja dalam memandang Ittama bukan sebagai pengawasan melainkan sebagai mitra.

“Ittama pun juga memposisikan dirinya sebagai mitra bukan sebagai pengawas. Oleh karena itu, beberapa unit kerja sudah mulai meminta pendampingan-pendampingan ketika akan melakukan suatu kegiatan,” tutup Totok. ■ [cas/sf](#)

# Terima Parlemen Perancis, DPR Bahas Hubungan Ekonomi

**Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Perancis Effendi M.S Simbolon menerima kunjungan Delegasi Parlemen Perancis yang dipimpin Raphael Gerard. Berbagai hal penting dibahas dalam pertemuan tersebut, khususnya hubungan di bidang ekonomi dan pertahanan antara Indonesia dengan Perancis.**

pembangunan berkelanjutan.

“Minyak kelapa sawit bukan komoditas biasa bagi Indonesia. Komoditas sawit memainkan peran penting dalam perekonomian dan

menyediakan lapangan kerja bagi 5,3 juta orang serta penghidupan bagi 21 juta orang di seluruh tanah air,” ungkapnya.

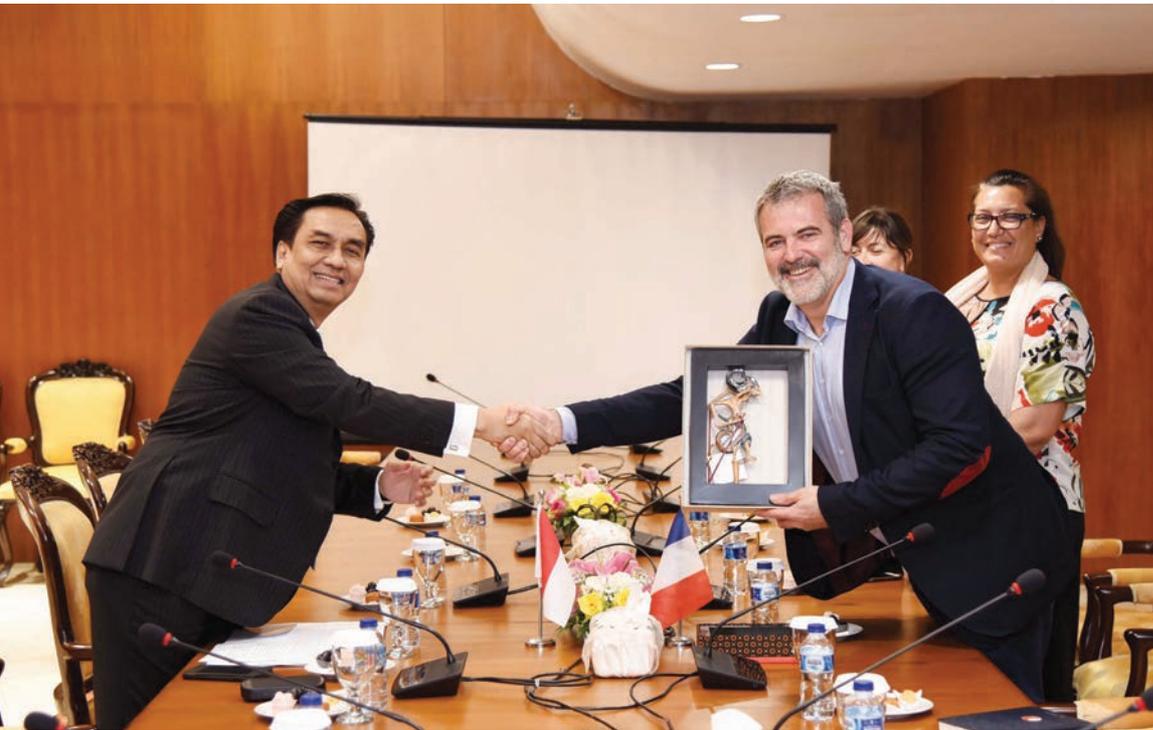
Saat ini, lanjut legislator daerah pemilihan (dakil) DKI Jakarta itu, Pemerintah Indonesia tengah mengkampanyekan *sustainability* di sektor *palm oil* Indonesia untuk mendorong ekspor *palm oil* ke negara-negara Uni Eropa, salah satunya Perancis.

“Salah satu wujud pengimplementasian komitmen tersebut, pemerintah dan *stakeholders* Indonesia juga telah membentuk *The Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* yang akan dijadikan sebagai standard dalam memproduksi *sustainable palm oil*,” urai Anggota Komisi I DPR RI itu.

Disektor pertahanan, mengemuka bahwa

keduanya berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian dan menjaga stabilitas perdamaian dunia. “Kadang-kadang ada pertemuan informal di wilayah Perancis oleh beberapa oknum dari Papua Merdeka dan mereka (Perancis) menyampaikan secara tegas sikapnya tidak berpihak pada isu tersebut,” imbuhnya.

Ketua Group Persahabatan Perancis - Indonesia Raphael Gerard berharap pertemuan ini dapat meningkatkan hubungan *people to people contact* antar kedua negara. Serta mendorong kerja sama dengan tujuan meningkatkan minat wisatawan dari Perancis maupun Indonesia untuk saling bertukar budaya yang ada di kedua negara. ■ ann/sf



Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Perancis Effendi M.S Simbolon bersalaman dengan Delegasi Parlemen Perancis Raphael Gerard

“ Kita membahas isu-isu yang berkembang, seperti isu perdagangan terkait CPO (Crude Palm Oil) kita, hubungan *people to people*, dan lingkungan hidup. Sedikit disinggung juga isu Papua,” ungkap Effendi usai menerima Delegasi Parlemen Perancis di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10) sore.

Turut hadir dalam pertemuan ini diantaranya Wakil Ketua GKSB Perancis - Indonesia Sandra Marsaud, Anggota Parlemen Perancis Maine Sage dan Duta Besar Perancis untuk RI Jean-Charles Berthonnet.

Legislator PDI-Perjuangan itu menuturkan, khusus dibidang ekonomi dan perdagangan, hubungan kedua negara semakin menunjukkan arah yang positif. Tercatat, nilai perdagangan

kedua negara pada tahun 2017 sebesar 2,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau meningkat 15 persen dari tahun sebelumnya.

“Hal ini memperlihatkan bahwa Indonesia serius dengan upaya peningkatan nilai perdagangan kedua negara. Kami juga berharap, Perancis dapat menjadi pintu gerbang ke pasar Eropa dan sebaliknya, Indonesia akan menjadi gerbang Perancis ke pasar Asia Tenggara (ASEAN),” papar Effendi.

Sementara terkait CPO atau minyak kelapa sawit yang menjadi industri strategis nasional, Effendi berharap Perancis dapat terlibat dan berperan untuk memberikan kampanye positif agar pemberitaan menjadi lebih berimbang dan masyarakat internasional lebih paham peran sawit terhadap



Tim Kunker BURT DPR RI foto bersama Jajaran Direksi Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Khadijah di Palembang

## BURT DPR Tinjau RSI Siti Khadijah

**Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau langsung Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Khadijah di Palembang, Sumatera Selatan. Rumah sakit bertipe B ini menjadi rumah sakit *provider* yang ditunjuk PT. Asuransi Jasindo untuk menjadi rumah sakit rujukan VVIP bagi para Anggota DPR RI dan keluarga.**

**W**akil Ketua BURT DPR Novita Wijayanti yang memimpin kunjungan ini, Selasa (30/10), mengatakan, “Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi anggota DPR RI beserta keluarganya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, maka BURT perlu melakukan peninjauan

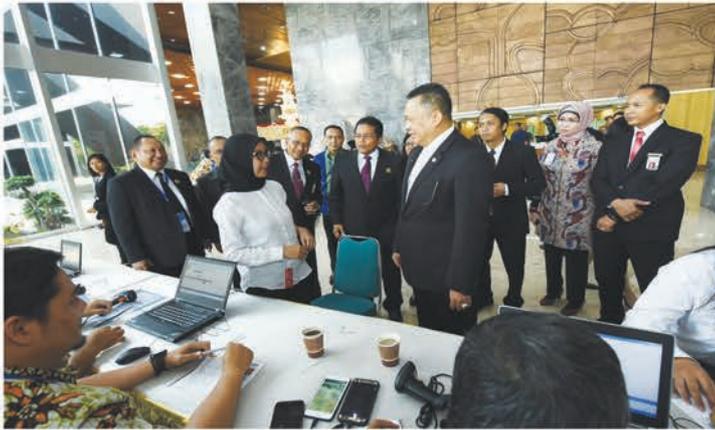
secara langsung terhadap pelaksanaan program dimaksud,” tutur Novi saat menggelar pertemuan dengan Direktur RSI Siti Khadijah.

Sebagai RS *provider*, RSI Siti Khadijah memiliki 7 tempat tidur VVIP dan 4 tempat tidur super VVIP. Selain itu, RS ini juga memiliki 38 dokter spesialis yang siap memberi layanan kesehatan bagi para anggota DPR dan keluarganya.

RS ini juga sebagian merupakan bantuan mendiang Ketua MPR RI Taufik Kiemas. Melihat dan mendengar langsung penjelasan dari otoritas RSI Siti Khadijah, Novi menilai, layanan dan fasilitas RS di pusat Kota Palembang ini sangat baik.

“Melalui kunjungan kerja ke rumah sakit *provider* ini diharapkan program Jamkestama bagi anggota DPR RI beserta keluarganya dapat lebih tersosialisasi dengan baik,” harap Novi.

Selain itu, harap legislator dapil Jawa Tengah itu, PT. Asuransi Jasindo melalui rumah sakit *provider*-nya diharapkan dapat memastikan bahwa program Jamkestama dilaksanakan secara optimal dan sesuai peraturan. ■ mh/mp



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meninjau pelaksanaan uji CPNS dengan didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Setjen dan BK DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat, (26/10). Foto : Jaka | od



Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia menandatangani kesepakatan postur RAPBN 2019, Selasa (30/10). Foto: Azka | od



Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI bersama Mendikbud Muhadjir Effendy menandatangani dokumen RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR), Selasa (30/10). Foto : Andri | od